

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan pokok negara yang sangat penting untuk membiayai perkembangan negara. Oleh karena itu, seluruh wajib pajak, baik pribadi maupun badan, sebaiknya melaksanakan tanggung jawab perpajakannya dengan jujur dan terbuka. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang mencoba menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui berbagai cara perencanaan fiskal. Salah satu metode yang umum adalah *tax avoidance*, yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian, kesadaran untuk membayar pajak masih menjadi masalah yang sering dihadapi hingga saat ini. Banyak wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak menjadi suatu beban, sehingga berusaha mencari cara untuk menghindari pajak (Novitasari dkk., 2025)

Fenomena penghindaran pajak tidak hanya terjadi pada korporasi swasta, tetapi juga pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun BUMN adalah bagian dari pemerintah, tetap terdapat peluang bagi BUMN untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban fiskal dan memperkuat hasil finansial. Hal ini menimbulkan permasalahan etika dan tata kelola korporasi, karena pajak yang seharusnya masuk ke kas negara justru dihindari oleh badan yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh negara (Setiadi & Supatmi, 2021).

Fenomena serupa juga terjadi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), yang dikenal memiliki tingkat utang yang sangat tinggi akibat pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur jalan tol. (Novitasari dkk., 2025) mengungkapkan bahwa WSKT menggunakan strategi peningkatan utang untuk mengurangi beban pajak melalui peningkatan biaya bunga yang ditimbulkan. Semakin besar utang yang ditanggung perusahaan, semakin besar pula biaya bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.

Untuk meminimalkan potensi tindakan tersebut, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat penting. GCG berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya agar kegiatan perusahaan berjalan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan hukum (Irawan dkk., 2024). Tiga komponen yang berperan dalam penerapan GCG adalah Komisaris independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional.

Komisaris independen memiliki peran penting dalam memastikan penerapan *good corporate governance* berjalan dengan baik. Komisaris independen bertugas mengawasi kinerja dan kebijakan manajemen agar tetap objektif serta tidak memihak kepentingan tertentu. Keberadaan komisaris independen dapat membantu menciptakan transparansi dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan, karena tidak memiliki hubungan dengan direksi maupun pemegang saham utama (Yuliani & Prastiwi, 2021).

Komite Audit berperan membantu dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan, proses audit, dan penerapan sistem pengendalian internal perusahaan (Nur'aini & Sherlita, 2023). Dengan adanya komite audit, pengawasan terhadap keuangan perusahaan dapat berjalan lebih optimal dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki kontribusi besar dalam mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *good corporate governance*.

Kepemilikan Institusional merupakan bentuk kepemilikan saham oleh lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga investasi lainnya (Sandy & Lukviarman, 2008). Lembaga-lembaga tersebut umumnya memiliki kepentingan untuk memastikan perusahaan dikelola dengan baik agar memperoleh keuntungan maksimal. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin kuat dan mendorong penerapan *good corporate governance* yang lebih efektif.

Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang berbeda-beda terkait pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Priatiningsih dkk. (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit dan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit memiliki peran

penting dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan sehingga dapat menekan praktik penghindaran pajak.

Wahyuni dkk. (2023) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin kuat penerapan tata kelola perusahaan melalui mekanisme pengawasan yang baik, maka tingkat penghindaran pajak cenderung menurun.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap dalam pengaruh komponen *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak, terutama pada perusahaan BUMN. Berdasarkan penelitian dari Pratianingsih dkk. (2024) dan Wahyuni dkk. (2023) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak cukup efektif dalam menekan penghindaran pajak, sementara sebagian lainnya menemukan bahwa komite audit memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Untuk memahami fenomena tersebut lebih dalam, penelitian ini akan menelaah bagaimana *good corporate governance*, yang diukur melalui Komisaris independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional, berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* sebagai landasan teori. Teori ini menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, di mana prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen (Meyna dkk., 2023) mengemukakan bahwa konflik kepentingan timbul ketika

pemilik memberikan wewenang kepada agen untuk mengatur dan menjalankan perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik. Keberadaan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik tersebut dan memastikan kebijakan perusahaan tetap sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran tata kelola perusahaan dalam menekan praktik penghindaran pajak, serta memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi dan kebijakan perpajakan di lingkungan BUMN (Irawan dkk., 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masih terdapat dugaan praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN meskipun telah menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan seperti komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang berbeda, sehingga menarik untuk diteliti kembali. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2) Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- 1) Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia..

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, terutama pada konteks perusahaan milik negara.

2) Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan BUMN, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat fungsi pengawasan melalui Komisaris independen dan Komite Audit guna meminimalkan praktik penghindaran pajak. Bagi investor dan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menilai tingkat transparansi dan integritas perusahaan dalam pengelolaan pajak. Selain itu, bagi pemerintah dan otoritas terkait, hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang lebih efektif di lingkungan BUMN.

1.4 Sistematika Penelitian

Penyajian penelitian diuraikan dalam beberapa bagian yang akan diuraikan di setiap bab di bawah ini :

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dilaksanakannya penelitian dan arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang mendukung penelitian, termasuk konsep-konsep dasar, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran teoretis, serta hipotesis penelitian. Dalam bab ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan (komisaris independen, komite audit dan kepemilikan instutisional) serta penghindaran pajak, yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan model penelitian.

BAB III – METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Di dalamnya mencakup jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel

dan pengukurannya, model analisis data, serta teknik pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV - PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengolahan data, analisis statistik, dan pembahasan hasil penelitian. Bagian ini menampilkan data yang telah dikumpulkan, hasil uji asumsi klasik, hasil uji regresi, serta interpretasi terhadap pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan hasil temuan penelitian dengan teori serta penelitian terdahulu.

BAB V – PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, sedangkan saran ditujukan bagi peneliti selanjutnya, pihak perusahaan, dan instansi terkait untuk perbaikan serta pengembangan penelitian di masa mendatang.